

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANIAN DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ALFA BANDIL
PATAR RUMAPEA
NOVVA N. PLENGITEN

Abstract: The welfare of the community is one of the goals expected by every region is no exception for the Talaud Island Regency various efforts are designed and implemented by the local Government solely to promote growth for the region itself and then expected to have a positive impact on the welfare of the community. While the welfare of poor people in Talaud Island Regency is still now seen from the income of the community that is small based on data in Central Bureau of Statistics of Talaud island Rehency. Local Government through Agricultural Service of Agriculture of Talaud Island Regency create and implement program of empowerment of poor society working as farmer where community empowerment is done by forming group of farmer with hope of existence of group of farmer this can improve prosperity of society which categorized as poor society. This research uses data collection technique that is descriptive research through technique of data collection that is observation, interview, and documentation. With data analysis techniques namely data reduction, data presentation and conclusion. The findings of this study indicate that the various agricultural assistance provided by the Local Government to be distributed to the poor through established farmer groups has had a good enough impact for the poor. Through the assistance provided at least the level of income and welfare of the poor have started to rise to a better level than before, although not all poor people feel the help given by the Local Government due to various limitations experienced by the Local Government one of them is the limited funds so that the process of providing assistance in the field of agriculture is not given fully to the poor but is gradually granted to the community through a predetermined procedure.

Keywords : Local Government, Policy, Agriculture

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial. Kemiskinan telah menjadi masalah karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi saja tetapi masalah kemanusiaan. Hampir semua Negara mengalami masalah ini, disisi lain bagi Negara-Negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan masalah terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada didalam masyarakat.

Masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang berpeofesi sebagai petani karena sebagian besar petani belum memiliki ketrampilan pertanian yang mampuni, sebabnya karena sebagian besar petani berpendidikan rendah. Keterbatasan ketrampilan, pendapatan yang rendah dan pendidikan yang kurang memadai itu membuat para petani kesulitan mengadopsi teknologi pertanian yang baru. Padahal perkembangan dunia pertanian

sekarang ini sangat tergantung dengan penguasaan teknologi. Paradigma di Indonesia harus digeser, bukan lagi pada produksi pangan atau berbagai program subsidi, melainkan lebih pada berorientasi mensejahterakan masyarakat miskin yang berprofesi sebagai petani untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi masyarakat yang berprofesi atau berkerja sebagai petani. Kesejahteraan masyarakat yang diraih oleh masyarakat itu sendiri yang diperoleh dari berbagai upaya, termasuk upaya dan kegiatan atau aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Untuk mencapai kondisi ideal ini diperlukan perencanaan dan aktivitas selain oleh masyarakat tersebut diperlukan juga peran pemerintah yang sangat dominan, baik menyangkut perencanaan, kegiatan dan bantuan biaya dan lain-lain. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum memadai, sehingga menyebabkan kemiskinan, ketertinggalan, keterpurukan ekonomi terus terjadi. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Bab III Pasal 4 menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2002 dengan tujuan utama yaitu memberi kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaud membuat dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat miskin yang bekerja sebagai petani dimana pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan cara pembentukan kelompok petani dengan harapan adanya pembentukan kelompok petani ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Masyarakat miskin yang bekerja sebagai petani terus diberdayakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian, mengingat kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung kebutuhan pangannya dari daerah lain seperti dari Kota Manado, padahal potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Daerah Talaud sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat miskin yang keadaan ekonominya berada dibawah garis rata-rata pendapatan, oleh karena itu Pemerintah terus berusaha memberdayakan masyarakat dengan menyediakan berbagai bantuan yang berhubungan dengan bidang pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk memacu semangat masyarakat yang bekerja sebagai petani untuk terus mau mengembangkan potensi pertanian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui Dinas Pertanian Pemerintah Daerah telah menyalurkan berbagai bibit tanaman dan pupuk serta beberapa fasilitas lainnya.

Tujuannya untuk memperlancar aktivitas pertanian dan pengelolaan hasil pertanian yang nantinya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang berprofesi sebagai petani. Namun apakah dengan program yang dibuat oleh Pemerintah ini sudah mampu kebutuhan seluruh masyarakat miskin, bahkan belakangan ini ditemukan pemberian bantuan yang salah sasaran kepada masyarakat yang tergolong mampu namun menerima bantuan dari Pemerintah. Dan ada pula masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan namun, hingga saat ini belum merasakan bantuan yang disediakan oleh Pemerintah lewat program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, hal ini yang menyebabkan masyarakat yang kenyataannya miskin semakin tersudut dan sulit untuk memperoleh kesejahteraan lewat program yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa program yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik. Namun masalah yang ada tetap menjadi suatu hal yang perlu dicermati hingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini yang diberi judul "Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanian Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Talaud".

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (publik makers). Istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada diluar stuktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin agak membingungkan.

Sedangkan menurut Anderson (1984) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasikan

kebijakan publik, menjadi dua yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakak-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan wewenang. Kelima, tujuan kebijakan publik adalah dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.

Konsep Pertanian

Menurut A. T. Mosher, pertanian adalah sejenis proses produksi yang di dasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Sedangkan menurut Sri Sulestari, pertanian adalah suatu jenis usaha yang menekankan pada kegiatan pengolahan tanah, tanaman yang di tanam berupa tanaman pangan. Sementara itu Karwan A. Salinkin memberikan pendapat pertanian adalah bagian agroekosistem yang tidak dapat di pisahkan dengan subsistem kesehatan dan lingkungan alam, manusia, dan budaya yang saling berkaitan dalam suatu proses produksi untuk kelangsungan hidup bersama.

Menurut Snodgrass dan Wallace (1975) mendefinisikan Kebijakan Pertanian sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemelihan komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan struktural dan pemberian fasilitas pertanian.

Menurut A.T Mosher (1996) Kebijakan Pertanian adalah serangkaian tindakan yang dipilih, untuk menentukan arah perubahan yang diinginkan dalam bidang pertanian yang memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu.

Konsep Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan menurut ahli yaitu : menurut Walter A. Friendlander (1996) Kesejahteraan adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk mencapai standar hidup yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Konsep Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan di mensi asset (pedoman umum 2004).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis peneelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dalam bungin (2001) bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penenelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu gambaran tentang kondisi, situasi dan variabel tertentu.

Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dengan pendekatan kualitatif sesuai dikutip dari Moleong (2007), seorang peneliti harus memperhatikan ciri-ciri yang mencakup latar ilmiah, manusia sebagai alat atau instrumen, metode kualitatif, analisa deskriptif. Lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya

kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang dirundingkan dan di sepakati bersama. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan situs penelitian ini yaitu di Tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Melonguane, Kecamatan Kabaruan dan Kecamatan Damau.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya. Purposive Sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi di dasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pertanian : 1 Orang
2. Kecamatan Kabaruan (Desa Pantuge) : 3 Orang
3. Kecamatan Damau (Desa Damau) : 3 Orang
4. Kecamatan Melonguane (Kelurahan Melonguane Barat) : 3 Orang

Fokus Penelitian

Pada dasarnya fokus dari penelitian ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Talaud”, berdasarkan pada Teori Anderson (1984) tentang kebijakan dan hal yang berkaitan

dengan kebijakan publik yang berada pada poin kelima yang menyebutkan Tujuan dari Kebijakan Publik adalah dapat dicapainya Kesejahteraan Masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data primer ini adalah data yang di peroleh secara langsung yang berhubungan dengan penelitian dan mampu memberikan informasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat di peroleh peneliti dengan cara melihat dan membaca.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu, Observasi, wawancara dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992), dimana dalam model analisis ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan semua informan baik itu informan Pemerintah dan Informan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut: Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani. Telah

dijalankan oleh Pemerintah Daerah dengan memberdayakan masyarakat lewat pembentukan kelompok-kelompok petani di setiap Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Talaud. Berbagai bantuan dibidang pertanian yang Pemerintah sediakan dan salurkan kepada masyarakat miskin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian bantuan yang dilaksanakan secara bertahap diberikan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok petani yang dibentuk.

Masyarakat yang menerima bantuan dari Pemerintah juga termasuk kategori masyarakat miskin dan termasuk juga dalam kelompok-kelompok petani dan terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemerintah. Sebagaimana masyarakat mengaku sudah menerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah melalui kelompok-kelompok petani mereka. Bantuan yang masyarakat terima berbentuk barang berupa bibit tanaman, modal dan fasilitas pertanian berupa alat-alat untuk keperluan pertanian. Dalam Setiap tahun program pemberdayaan masyarakat petani berjalan bantuan yang diterima oleh kelompok-kelompok petani itu hanya sekali dalam setahun. Melalui program tersebut setidaknya Pemerintah sudah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang bekerja sebagai petani.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Petani untuk menunjang kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana dari kebijakan tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mencapai suatu hasil pada akhirnya akan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari dikeluarkannya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang bekerja sebagai Petani adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian yang ada di

Kabupaten Kepulauan Talaud terlebih lagi dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri melalui bantuan yang disediakan oleh Pemerintah untuk masyarakat. Kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah.

Petani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu membentuk kelompok-kelompok tani dan telah diuji kelayakannya untuk menerima bantuan dari Pemerintah, berdasarkan tahapan pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok tani dalam bentuk barang maupun modal dibidang pertanian dengan pendampingan dari Pemerintah. Pemerintah terus memberdayakan masyarakat miskin dibidang pertanian melalui Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memacu semangat masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian yang ada di daerah Talaud, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian telah pula menyalurkan berbagai bantuan baik itu bibit tanaman maupun fasilitas pertanian. Tujuannya adalah untuk memperlancar aktivitas berkebun dan pengelolaan hasil panen para petani. Dinas Pertanian juga melakukan pendampingan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Melalui Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani. Setidaknya sudah sebagian besar masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Talaud sudah bisa mencapai taraf kesejahteraan, walaupun belum semua masyarakat miskin di Kabupaten Talaud meraskan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, karena bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah bertahap dan disesuaikan dengan dana dari setiap program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Penelitian Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanian Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dibidang pertanian yang berpihak kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya. Kesejahteraan yang dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan suatu keberhasilan dari Pemerintah Daerah dalam setiap program yang dijalankan yang ditujukan untuk masyarakat. Berbagai bantuan dibidang pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok petani yang dibentuk sudah memberikan dampak yang cukup baik untuk masyarakat miskin. Melalui bantuan yang diberikan setidaknya tingkat pendapatan dan kesejahteraan dari masyarakat miskin sudah mulai menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
2. Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memajukan taraf hidup masyarakat miskin, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat miskin itu sendiri melalui Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin ini Pemerintah Daerah berharap kiranya kesejahteraan dari masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat meningkat dan menjadi lebih baik lagi.

Saran

1. Bagi Pemeintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud kiranya lebih lagi memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin yang belum merasakan bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

melalui bantuan dibidang pertanian, sehingga melalui bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kepada masyarakat miskin kesejahteraan masyarakat miskin dapat dicapai secara menyeluruh.

2. Untuk masyarakat miskin yang sudah mendapatkan bantuan dibidang pertanian dari Pemerintah Daerah yang disalurkan lewat kelompok-kelompok petani, kiranya dapat mengembangkan lagi potensi pertanian yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang pertanian, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari masyarakat miskin itu sendiri supaya menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukiminto 2013. Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, pembangunann sosial, dan kajian pembangunan). Depok, Rajawali Press.
- Anderson. James. A. 1997. Publik Policy Making Third Edition, USA. Penerbit Houghton Mifflin Company.
- Bugin dan Burhan 2001. Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Airlangga University Perss, Surabaya
- Edi Suharto 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Penerbit Alfabeta, Bandung

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani
- Peraturan Pemerintah Daerah No 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud No 9 Tahun 2014 Tentang RPJMD BAB III Pasal 4